

Kolaborasi CekFakta.com Hadapi Klaim Kompleks dan Disinformasi Debat Pemilu 2024

CekFakta.com Collaboration Addresses Complex Claims and Misinformation in the 2024 Election Debate

Febrina Galuh Permanasari ¹, Devina Dhea Pabundu ²

^{1,2}Universitas Indonesia, Indonesia
^{1,2} Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta Pusat, Indonesia
Email: ² febrina.galuh@ui.ac.id

Received : February 27, 2025 ; Revised: May 2, 2025; Accepted: August 10, 2025

Abstrak

Debat Pemilu 2024 di Indonesia memunculkan tantangan baru dalam penyebaran disinformasi digital, terutama terkait klaim-klaim yang belum terverifikasi dari para kandidat. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas kolaborasi CekFakta.com sebagai inisiatif *collaborative fact-checking* dalam menjaga integritas informasi selama debat Pemilu 2024. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis artikel pemeriksaan fakta yang diproduksi selama lima putaran debat serta melakukan wawancara dengan anggota tim CekFakta.com. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi lintas media dan organisasi masyarakat sipil dapat meningkatkan efisiensi verifikasi dan memperkuat legitimasi hasil pemeriksaan fakta di tengah derasnya arus disinformasi politik. Namun, tantangan seperti kecepatan penyebaran disinformasi, polarisasi politik, serta perbedaan standar pelabelan dan struktur artikel antar media anggota masih menjadi hambatan utama. Temuan ini menegaskan perlunya inovasi dan adaptasi berkelanjutan agar pemeriksaan fakta tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika demokrasi digital yang semakin kompleks.

Kata kunci: *Collaborative fact-checking*; Debat pemilu; Disinformasi; Media digital; Transparansi

Abstract

The 2024 Indonesian presidential debates presented new challenges in the spread of digital disinformation, particularly regarding unverified claims made by candidates. This study aims to evaluate the effectiveness of CekFakta.com's collaborative fact-checking initiative in maintaining information integrity during the 2024 election debates. Using a descriptive qualitative approach, this research analyzes fact-checking articles produced during five debate rounds and conducts interviews with CekFakta.com team members. The findings indicate that cross-media and civil society collaboration enhances verification efficiency and strengthens the legitimacy of fact-checking results amid the rapid flow of political disinformation. However, challenges such as the speed of disinformation dissemination, political polarization, and differences in labeling standards and article structures among member media remain significant obstacles. These results highlight the need for continuous innovation and adaptation to ensure that fact-checking remains relevant and effective in the increasingly complex dynamics of digital democracy.

Keywords: *Collaborative fact-checking; Digital media; Disinformation; Election debate Transparency.*

1. Pendahuluan

Pemilu merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin dan menentukan arah kebijakan negara. Indonesia melalui Pemilu untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Februari 2024 (*Jadwal Lengkap Pemilu 2024 Dan Tahapannya*, 2023). Namun, di era digital, proses pemilu tidak hanya berlangsung dalam kotak suara, tetapi juga dalam ruang diskusi daring, terutama melalui media sosial. Manipulasi informasi selama proses pemilihan umum merupakan isu yang semakin mendesak, terutama di era digital saat ini (Belinda et al., 2024). Ruang demokrasi seperti pemilu juga sering kali dipenuhi oleh misinformasi dan disinformasi yang dapat memengaruhi opini publik dan keputusan politik masyarakat (Wardle & Derakhshan, 2017).

Misinformasi, yang didefinisikan sebagai informasi salah yang disebarkan tanpa niat buruk, dan disinformasi, informasi salah yang sengaja disebarkan untuk tujuan manipulasi, menjadi tantangan besar dalam menjaga integritas pemilu (Wardle & Derakhshan, 2017). Misinformasi sering kali beredar dengan cepat di media sosial, dan tanpa adanya intervensi yang efektif, hal ini dapat mengakibatkan dampak negatif pada proses demokrasi (Bak-Coleman et al., 2022). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa upaya untuk memverifikasi kebenaran informasi dapat

meningkatkan pemahaman pemilih tentang isu-isu politik dan membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik (Wintersieck, 2017).

Di Indonesia, kekhawatiran yang signifikan tentang apa yang disebut sebagai maraknya berita hoax mulai menjadi perhatian saat pemilihan gubernur Jakarta tahun 2017 (Tapsell, 2018). Sejak saat itu, mulai muncul inisiatif media untuk melakukan *fact-checking* atau pemeriksaan fakta dari informasi digital. Praktik *fact-checking* telah menjadi semakin penting dalam konteks media dan pemilu, terutama dalam menghadapi tantangan penyebaran informasi yang salah (Rahmawan et al., 2022).

Salah satu aspek kunci dari manipulasi informasi adalah penggunaan bahasa yang menyesatkan dan retorika yang agresif dalam debat politik. Sebagai contoh, dalam pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2020, debat antara kandidat ditandai dengan serangan verbal dan penyebutan nama yang merendahkan, yang menciptakan suasana ketidakpercayaan dan kebingungan di kalangan pemilih (Bond et al., 2017; Bond et al., 2022). Penelitian menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan dalam kampanye dapat berfungsi untuk membangun citra tertentu dan mengaburkan fakta, sehingga mengarah pada persepsi yang salah tentang kandidat (Bond et al., 2017). Ini menunjukkan bahwa pemilih perlu dilengkapi dengan alat

untuk menilai klaim yang dibuat oleh kandidat secara kritis.

Salah satu inisiatif yang mengambil peran utama dalam pemeriksaan fakta adalah CekFakta.com. Platform ini diluncurkan pada tahun 2019 sebagai kolaborasi antara Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo). CekFakta.com dirancang untuk memfasilitasi kolaborasi antar lembaga dalam memeriksa fakta, terutama selama momen-momen penting seperti pemilu. Pada Pemilu 2024, inisiatif ini berfokus pada pemeriksaan klaim-klaim yang muncul selama debat kandidat dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang akurat kepada masyarakat berdasarkan verifikasi fakta (CekFakta.com, n.d). Dalam konteks ini, kolaborasi antara media dan organisasi fact-checking sangat penting untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada pemilih. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketika masyarakat terpapar pada klaim yang tidak terbukti, kepercayaan mereka terhadap pemilu dapat terganggu, sehingga menekankan perlunya upaya *fact-checking* yang efektif (Lee, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana CekFakta.com melakukan kurasi informasi selama debat Pemilu 2024. Fokus utama adalah pada mekanisme kolaborasi yang diterapkan oleh platform ini dalam memeriksa fakta dan menyusun artikel yang kredibel. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi

dalam proses tersebut, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan fakta di masa depan.

2. Kerangka Teori Misinformasi, Disinformasi, dan Malinformasi

Dalam lanskap digital saat ini, perbedaan antara informasi palsu menjadi krusial. Menurut Shu et al. (2020) misinformasi, disinformasi, dan malinformasi adalah tiga konsep yang muncul untuk mendeskripsikan gangguan informasi (*information disorder*). Misinformasi merujuk pada informasi yang salah yang disebarkan tanpa niat buruk, sedangkan disinformasi adalah informasi yang salah yang disebarkan dengan tujuan untuk menipu atau membingungkan orang lain. Malinformasi, di sisi lain, adalah informasi yang benar tetapi disebarkan dengan niat untuk menyebabkan kerugian. Menurut Shu et al. (2020), ketiga konsep ini saling terkait dan memiliki dampak yang signifikan terhadap persepsi publik dan proses pengambilan keputusan.

Wardle (2019) menyebutkan bahwa disinformasi dibuat dengan tiga motivasi seperti menghasilkan uang; memiliki pengaruh dalam politik domestik dan internasional; atau menyebabkan masalah. Lebih jauh setelah 2016, disinformasi juga semakin beragam dengan adanya *weaponization of context*, penggunaan konten asli tetapi konten yang diselewengkan dan dibingkai ulang.

Fact-checking

Fact-checking merupakan proses verifikasi klaim faktual, khususnya yang beredar di ruang publik, dengan tujuan untuk mengidentifikasi kebenaran atau ketidakbenaran informasi tersebut (Graves & Cherubini, 2016). Proses ini tidak hanya terbatas pada klaim yang disampaikan oleh politikus atau tokoh publik, tetapi juga mencakup narasi yang tersebar melalui media sosial dan platform digital lainnya.

Perkembangan *fact-checking* di era digital telah mengalami transformasi signifikan. Awalnya, *fact-checking* sering dilakukan sebagai bagian integral dari jurnalisme investigasi atau editorial media massa. Namun, dengan proliferasi internet dan media sosial, volume informasi meningkat pesat, memicu munculnya organisasi *fact-checking* independen dan inisiatif khusus yang berdedikasi penuh pada verifikasi informasi (Graves & Amazeen, 2019; Graves & Cherubini, 2016). Era digital memungkinkan *fact-checking* dilakukan lebih cepat, menjangkau audiens yang lebih luas, dan memanfaatkan teknologi untuk analisis data dan visualisasi.

Peran *fact-checker* dalam ekosistem informasi sangat krusial. Mereka bertindak sebagai penjaga gerbang informasi (*gatekeepers*) yang berperan aktif dalam memilah dan mengevaluasi keabsahan informasi (Singer, 2023). Dalam konteks ekosistem informasi yang kompleks dan rentan disinformasi, *fact-checker* membantu publik membuat keputusan yang lebih terinformasi, meningkatkan literasi media, dan menekan penyebaran narasi palsu (Lim, 2018). Kehadiran *fact-checker*

juga berkontribusi pada akuntabilitas pihak-pihak yang membuat klaim, mendorong standar akurasi yang lebih tinggi dalam wacana publik.

Neo-institusionalisme dalam Konteks Media

Neo-institusionalisme (Strömbäck & Esser, 2014) menawarkan perspektif untuk memahami bagaimana organisasi, termasuk media berita, beroperasi tidak hanya berdasarkan logika ekonomi atau teknis semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh norma, nilai, kepercayaan, dan praktik bersama yang berlaku dalam suatu bidang. Dalam pandangan ini, berbagai media berita, meskipun secara formal adalah entitas yang terpisah dan seringkali berkompetisi, dapat dipandang sebagai bagian dari sebuah bidang interorganisasional (*interorganizational field*).

Konsep utamanya adalah bahwa dalam bidang ini, media-media tersebut cenderung mengembangkan "kesepakatan transorganisasional mengenai proses dan konten berita" (*transorganizational agreement on news processes and content*) (Cook, 2005 dalam Strömbäck & Esser, 2014). Artinya, ada serangkaian aturan dan norma yang tidak tertulis—bisa berupa praktik profesional, etika jurnalistik, atau bahkan ekspektasi publik—yang secara kolektif mengatur bagaimana media beroperasi. Akibatnya, dari perspektif neo-institusionalisme, seluruh media berita dapat dipersepsikan sebagai sebuah institusi tunggal yang memberikan pengaruh. Pengaruh ini berasal dari perilaku operasional yang secara keseluruhan cenderung konsisten, serta liputan politik dan urusan

terkini yang selaras dan kumulatif (Cook, 2005 dalam Strömbäck & Esser, 2014; Esser, 2013). Dalam konteks CekFakta.com, neo-institusionalisme membantu menjelaskan mengapa berbagai media, dengan otonomi redaksional masing-masing, dapat bersatu dalam sebuah inisiatif kolaboratif untuk *fact-checking*.

Model Collaborative Fact-Checking

Model collaborative fact-checking merujuk pada pendekatan di mana berbagai individu, organisasi, atau entitas bekerja sama untuk melakukan verifikasi fakta. Menurut Wardle dan Derakhshan (2017), kolaborasi dalam pemeriksaan fakta memungkinkan berbagai pihak untuk berbagi sumber daya, keahlian, dan perspektif yang berbeda. Hal ini penting karena misinformasi sering kali menyebar dengan cepat melalui berbagai platform digital, sehingga memerlukan respons yang cepat dan terkoordinasi. Kolaborasi dapat melibatkan berbagi sumber daya, keahlian, dan platform untuk mencapai tujuan bersama.

Salah satu contoh implementasi model ini adalah proyek *CrossCheck* yang diluncurkan oleh First Draft pada pemilu Prancis 2017. Proyek ini melibatkan 37 organisasi media yang bekerja sama untuk memverifikasi klaim yang beredar selama kampanye pemilu (*CrossCheck: Our Collaborative Online Verification Newsroom*, 2017). Proyek ini menunjukkan bahwa kolaborasi dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi proses pemeriksaan fakta, terutama dalam situasi di mana informasi yang salah dapat memengaruhi opini

publik secara signifikan (Graves & Cherubini, 2016).

Contoh lain dari *collaborative fact-checking* di dunia menunjukkan keberhasilan model ini. Misalnya, International Fact-Checking Network (IFCN) adalah contoh jaringan global yang menghubungkan *fact-checker* di seluruh dunia (*International Fact-Checking Network*, 2018). Di Taiwan, ada CoFacts yang dikembangkan menjadi platform *fact-checking* kolaboratif berbasis warga dan sumber terbuka (*Cofacts*, 2023), sedangkan di benua Afrika, kumpulan organisasi sipil dan media mendirikan African Fact-Check Alliance (AFCA) untuk mendistribusi hasil verifikasi informasi dalam bahasa asing maupun bahasa lokal (Africa, 2023).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami bagaimana CekFakta.com melakukan kurasi informasi dan pemeriksaan fakta selama debat Pemilu 2024. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam dan mendapatkan wawasan yang lebih kaya tentang proses yang terjadi. Dengan berfokus pada analisis proses internal (kolaborasi antar anggota) dan keluaran eksternal (artikel pemeriksaan fakta) dari CekFakta.com yang dihasilkan selama proses *Live Fact-Checking* debat Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana tim CekFakta.com berkolaborasi

dalam memverifikasi klaim yang muncul acara itu berlangsung.

Untuk memberikan kedalaman data kuantitatif, penelitian ini juga melakukan wawancara untuk mengumpulkan tambahan informasi dengan Koordinator Cekfakta.com, Adi Marsiela dan Koordinator *Live Fact-checking* sekaligus Sekretaris Jenderal AJI periode 2021-2024, Ika Ningtyas Unggraeni. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana proses pemilihan klaim-klaim yang diperiksa faktanya selama debat dan diberitakan.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

CekFakta.com beroperasi sebagai inisiatif kolaboratif yang melibatkan berbagai organisasi media dan jurnalis di Indonesia. Mekanisme kolaborasi ini menjadi tulang punggung dalam kurasi informasi dan pemeriksaan fakta, terutama selama momen krusial seperti debat Pemilu 2024 yang menghasilkan volume klaim politik yang tinggi. Untuk mengantisipasi informasi keliru dan klaim yang menyesatkan selama debat calon presiden dan wakil presiden Indonesia, CekFakta.com mengadakan *live fact-checking*. Kegiatan ini merupakan mekanisme kerja bersama serentak dalam waktu tertentu karena adanya peristiwa yang dianggap penting, dalam konteks penelitian ini adalah Pemilu 2024 (wawancara Ika Ningtyas, 3 Juni 2025).

Sebelum memulai *live fact-checking*, kolaborasi CekFakta.com menyusun dokumen panduan teknis yang menjelaskan pola kerja, alur

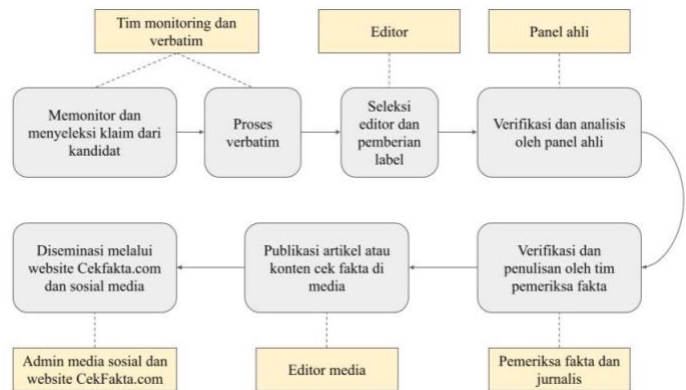
koordinasi, tim yang terlibat, serta klaim yang diperiksa (*Panduan Teknis Kolaborasi Cek Fakta Debat Capres- Cawapres 2023-2024*, 2023). Panduan tersebut disebar dan disosialisasikan kepada anggota organisasi dan media yang terlibat. Pada Debat Capres Cawapres 2024 diikuti oleh pemeriksa fakta dari 16 media, dan 3 organisasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Masyarakat Anti Fitnah dan Hoaks (Mafindo) (Ino, 2024). Media yang terlibat yakni liputan6.com, tempo.co, KBR.id, medcom.id, timesindonesia.co.id, beritasatu.com, The Conversation Indonesia, tribunnews.com, LKBN Antara, suara.com, Bisnis Indonesia, kompas.com, solopos.com, viva.co.id, tirta.id dan Suara Surabaya. Kegiatan tersebut digelar sebanyak lima kali sesuai jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakni pada 12 Desember 2023, 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, 21 Januari 2024 dan 4 Februari 2024 (Liputan6, 2023). Dari jadwal debat tersebut, Koalisi CekFakta.com menggelar pemeriksaan fakta secara *hybrid* sebanyak tiga kali, masing-masing satu di bulan Desember, Januari dan Februari.

Dari hasil wawancara dengan Ika Ningtyas Unggraeni (3 Juni 2025). Selama *live fact-checking*, mereka menyusun tim yang dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu: Tim Monitoring dan Verbatim, bertugas memantau pernyataan kandidat secara *real-time*, menyusun transkrip pernyataan, serta memasukkannya dalam database; Editor, mengkurasi klaim yang sudah dikumpulkan “Tim Monitoring dan

Verbatim” untuk diteruskan ke panel ahli. Editor juga memastikan isi artikel pemeriksaan fakta yang dipublikasikan seragam; Tim Panel Ahli, yang terdiri dari akademisi dan peneliti yang membantu memverifikasi klaim dengan analisis mendalam dan data; dan tim Pemeriksa Fakta, yang bertanggung jawab melakukan verifikasi menggunakan data dari panel ahli atau sumber terpercaya lainnya. Mereka juga bertugas membuat artikel.

Kolaborasi CekFakta.com melibatkan banyak pihak yang saling berkoordinasi. Seperti yang dijelaskan oleh Adi Marsiela, koordinator CekFakta.com, “Kolaborasi ini lebih fokus pada mengawasi dan memverifikasi klaim yang sudah disampaikan oleh kandidat calon presiden atau wakil presiden selama debat berlangsung. Kami langsung kumpulkan dan buat verbatimnya, yang akhirnya dibantu para panel ahli untuk verifikasi dengan data. Media dan pemeriksa fakta dapat menambahkan data sekunder yang mereka ketahui. Struktur ini memungkinkan pembagian tugas yang efisien di antara pihak yang terlibat. Pembagian peran ini memungkinkan respons yang lebih cepat dan komprehensif terhadap klaim yang berpotensi menyesatkan.” (Wawancara Adi Marsiela, 3 Juni 2025).

Gambar 1. Alur kerja Cekfakta.com saat *live fact-checking* debat



Sumber: olah data penulis

Proses Identifikasi Klaim dan Verifikasi Informasi

Proses identifikasi klaim yang berpotensi menyesatkan selama debat Pemilu 2024 adalah langkah awal yang krusial. Tim monitoring CekFakta.com secara aktif memantau pernyataan para kandidat. Menurut Adi Marsiela, mereka memiliki pola proses identifikasi klaim yang dianggap berpotensi menyesatkan, kemudian diseleksi dan diprioritaskan. “Ada editor yang dipilih untuk memberikan tanda apakah klaim yang dikumpulkan bisa diteruskan ke panel ahli atau pemeriksa fakta serta mana yang tergolong *tier 1*, *tier 2*, atau *rejected*. Klaim yang muncul berupa opini dan tanpa data akan sulit diverifikasi, jadi Editor akan memberi label *rejected*, *tier 1* untuk klaim prioritas untuk segera diverifikasi dan *tier 2* menjadi prioritas kedua. Editor sangat berperan memoderasi proses yang berikutnya masuk ke analisis dari panel ahli.” (Wawancara Adi Marsiela, 3 Juni 2025). Ini mengindikasikan adanya kriteria tertentu dalam menentukan klaim mana yang akan diverifikasi,

berdasarkan potensi dampak dan signifikansi politik dari klaim tersebut. Klaim-klaim ini biasanya muncul dari pernyataan langsung para kandidat dalam debat dan transkrip debat.

Kolaborasi ini difasilitasi oleh penggunaan platform digital seperti *Slack*, *Zoom*, *Whatsapp* dan *Google Spreadsheet*. *Slack*, *Zoom*, dan

Whatsapp digunakan untuk komunikasi *real-time* antar anggota tim, sementara *Google Spreadsheet* digunakan untuk berbagi dokumen, mengumpulkan data, dan hasil secara kolaboratif. Menurut Adi Marsiela, platform ini sangat penting untuk mengatasi kendala geografis, mengingat anggota tim berasal dari berbagai wilayah di Indonesia.

Tabel 1. Daftar Klain yang dikumpulkan selama proses *live fact-checking*

Kandidat	Debat 1	Debat 2	Debat 3	Debat 4	Debat 5	Total Klaim
Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar	23	23	10	10	9	75
Ganjar Pranowo - Mahfud Md	8	18	12	17	12	67
Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka	14	14	9	15	5	57
Total Klaim Setiap Debat	45	55	31	42	26	200

Sumber: olah data penulis

Sinergi antar pihak yang terlibat seperti pemeriksa fakta, panel ahli, dan media adalah kekuatan utama model kolaboratif ini. Ketika sebuah klaim diidentifikasi, tugas verifikasi dapat dibagikan kepada jurnalis dari media yang berbeda. Ini berarti bahwa verifikasi sebuah klaim melibatkan beberapa jurnalis dengan spesialisasi atau akses sumber yang berbeda, yang kemudian hasilnya disatukan.

Proses kurasi dan pemeriksaan fakta di CekFakta.com tidak hanya berhenti pada verifikasi klaim, tetapi juga melibatkan serangkaian tahapan untuk mengubah temuan menjadi artikel yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama dalam konteks politik yang sensitif.

Proses identifikasi klaim yang berpotensi menyesatkan selama debat Pemilu 2024 adalah langkah awal

yang krusial. Tim monitoring CekFakta.com secara aktif memantau pernyataan para kandidat. Menurut Adi Marsiela, mereka memiliki pola proses identifikasi klaim yang dianggap bisa diverifikasi seperti punya data dan bukan opini, kemudian diseleksi dan diprioritaskan. Volume klaim yang harus diidentifikasi dan diverifikasi oleh CekFakta.com selama lima putaran debat sangat signifikan. Berikut adalah rekapitulasi jumlah klaim yang dikumpulkan dari masing-masing pasangan kandidat selama debat Pemilu 2024:

Data di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan, CekFakta.com mencatat 200 klaim yang berpotensi untuk diperiksa faktanya sepanjang lima debat Pemilu 2024. Pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar

menjadi pihak dengan klaim terbanyak yang diidentifikasi (75 klaim), diikuti oleh Ganjar Pranowo - Mahfud Md (67 klaim), dan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka (57 klaim). Klaim-klaim ini biasanya muncul dari pernyataan langsung para kandidat dalam debat dan transkrip debat.

Dari klaim-klaim yang berhasil diidentifikasi dan diverifikasi,

CekFakta.com kemudian menghasilkan artikel-artikel pemeriksaan fakta. Artikel yang telah selesai diverifikasi selanjutnya dipublikasikan di situs web media yang tergabung dalam kolaborasi. Selain itu, artikel juga disebarluaskan melalui media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas.

Tabel 2. Artikel periksa fakta yang dihasilkan selama debat dilihat dari pasangan calon

Pasangan kandidat	Debat					
	Pertama	Kedua	Ketiga	Keempat	Kelima	Total
Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar	14	23	23	44	33	137
Ganjar Pranowo - Mahfud Md	14	24	24	36	33	131
Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka	12	25	25	35	32	129
Grand Total	40	72	72	115	98	397

Sumber: olah data penulis

Pada debat pertama, jumlah artikel masih rendah dan merata, Anies dan Ganjar masing-masing 14, Prabowo 12. Debat kedua dan ketiga meningkat menjadi 72 artikel dengan distribusi merata. Puncaknya terjadi di debat keempat dengan 115 artikel, terdiri dari Anies 44, Ganjar 36, dan Prabowo 35. Debat kelima turun menjadi 98 artikel, dengan perhatian serupa di antara pasangan calon. Secara umum, jumlah artikel meningkat di debat akhir, mencerminkan perhatian terhadap klaim yang diajukan, terutama pada isu-isu yang lebih intens.

Tabel 2 menunjukkan bahwa CekFakta.com memproduksi 397 artikel pemeriksaan fakta dari total klaim yang diidentifikasi sepanjang lima debat. Angka ini

mengindikasikan bahwa satu artikel dapat memverifikasi lebih dari satu aspek dari klaim yang sama, atau bahkan beberapa artikel ditulis dari klaim yang sama oleh media yang berbeda. Salah satu tantangan dalam kolaborasi ini adalah menjaga konsistensi hasil pemeriksaan fakta di antara media yang berkolaborasi. Adi Marsiela menyoroti adanya perbedaan penulisan dan kelengkapan informasi artikel pemeriksaan fakta meskipun klaimnya sama dan data di *spreadsheet* CekFakta.com seragam (Wawancara Adi Marsiela, 3 Juni 2025). Hal ini menunjukkan adanya interpretasi dan eksekusi penulisan yang berbeda oleh masing-masing media.

Tabel 3 menunjukkan bahwa dari total 397 artikel pemeriksaan fakta yang dihasilkan, sebanyak 154 klaim diklasifikasikan sebagai "Salah", menjadikannya kategori terbanyak. Ini mengindikasikan tingginya volume disinformasi atau klaim yang tidak akurat yang muncul selama debat. Sementara itu, 89 klaim dinyatakan "Benar", dan 26 klaim dikategorikan sebagai "Sebagian Benar". Kategori "Tanpa label" yang mencapai 258 artikel merupakan jumlah terbesar, menunjukkan sebuah tantangan signifikan. Fenomena "Tanpa label" ini terjadi karena adanya perbedaan format penulisan hasil periksa fakta di media-media yang berkolaborasi. Meskipun CekFakta.com dan koordinatornya sudah menerapkan rekomendasi *labeling* menggunakan kategori standar seperti "Benar", "Sebagian Benar", "Salah", "Tidak Terbukti", atau "Konteks Hilang", artikel yang tanpa label ini dipublikasikan di media yang tidak memiliki standar *labelisasi* atau berbeda dari panduan CekFakta. Hal ini mencerminkan perbedaan implementasi standar di antara media anggota. Hal ini juga disampaikan oleh Adi Marsiela, "Saat proses briefing dan sosialisasi selalu disampaikan bentuk label yang bisa digunakan media, serta bagaimana proses koordinasi jika terjadi perbedaan interpretasi data/informasi. Namun setiap organisasi media memiliki kebijakannya sendiri terkait pemeriksaan fakta dan pelabelan, yang tidak tunduk pada intervensi Koalisi Cek Fakta. Saat proses debat berlangsung, editor juga mengingatkan jika ada klaim dengan label *tier* 1, untuk tidak lupa dibuat artikel periksa faktanya."

Tabel 3. Label atau kesimpulan yang diberikan pada artikel periksa fakta debat Pilpres 2024

Label atau Kesimpulan yang Diberikan Terhadap Klaim	Jumlah
1. Benar	89
2. Salah	15
4. Sebagian Benar	26
5. Belum Ada Bukti	9
6. Tanpa label	258
Grand Total	397

Sumber: olah data penulis

Struktur artikel periksa fakta yang dipublikasikan oleh media-media yang tergabung dalam kolaborasi CekFakta.com menunjukkan adanya variasi format meskipun seluruh media telah menerima dan merujuk pada panduan label atau konklusi yang disusun oleh koordinator CekFakta.com. Pada praktiknya, klaim yang sama dapat ditampilkan dengan cara yang berbeda oleh masing-masing media. Tempo.co secara konsisten menampilkan label atau konklusi hasil pemeriksaan fakta pada judul artikelnya, misalnya "Benar, Klaim Muhaimin Iskandar bahwa Target Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia Turun dari 25 persen ke 17 persen." Selain itu, Tempo.co juga menuliskan isi klaim yang diverifikasi dan mengikutinya dengan frasa seperti "begini faktanya" atau "ini faktanya," sehingga pembaca langsung diarahkan pada inti verifikasi.

Sementara itu, Tirto.id cenderung menyebutkan nama kegiatan terlebih dahulu sebelum

menguraikan klaim yang diverifikasi. Contohnya, judul artikel mereka dapat berbunyi “Cek Fakta Debat Cawapres, Cak Imin: Jumlah Petani Gurem di Indonesia 3 Juta.” Struktur isi artikel Tirto.id menampilkan kutipan klaim yang diperiksa, diikuti dengan penyajian data atau informasi relevan yang mendukung proses verifikasi.

Solopos menggunakan pola yang berbeda, yakni mengawali judul dengan frasa “Cek Fakta” yang kemudian diikuti dengan isi klaim, seperti pada contoh “Cek Fakta: Muhaimin Iskandar Sebut Petani Gurem Indonesia Sebanyak 3 Juta.” Pada bagian isi, Solopos menampilkan kutipan klaim yang diverifikasi, lalu menyajikan data, informasi, atau kutipan ahli yang relevan terhadap klaim tersebut.

TimesIndonesia.co.id memiliki kekhasan dengan menampilkan foto kandidat yang bersanding dengan isi klaim pada bagian awal artikel. Struktur isinya terdiri dari kutipan klaim, pemeriksaan fakta yang memuat informasi pendukung, dan pada bagian akhir artikel memuat kesimpulan serta disclaimer bahwa artikel tersebut dihasilkan dari kolaborasi CekFakta.com.

Dalam hal penutup artikel, Tempo.co dan TimesIndonesia.co.id secara konsisten menampilkan kesimpulan hasil pemeriksaan fakta dan menambahkan disclaimer kolaborasi, sedangkan Tirto.id dan Solopos tidak selalu memuat bagian kesimpulan. Perbedaan struktur ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat panduan bersama, implementasi di masing-masing media tetap dipengaruhi oleh kebijakan editorial dan gaya

penulisan yang khas. Variasi ini memperlihatkan tantangan dalam menjaga konsistensi format dan interpretasi hasil pemeriksaan fakta dalam kolaborasi lintas media, namun pada saat yang sama juga menunjukkan fleksibilitas dan adaptasi media dalam menyampaikan hasil verifikasi kepada audiens mereka.

Tantangan dan Peluang dalam Konteks Politik Debat Pemilu 2024

Pelaksanaan *collaborative fact-checking* oleh CekFakta.com selama debat Pemilu 2024 tidak lepas dari berbagai tantangan, namun juga membuka peluang signifikan untuk penguatan ekosistem informasi yang sehat. Salah satu tantangan utama adalah kecepatan penyebaran disinformasi yang seringkali jauh lebih cepat dibandingkan kecepatan verifikasi dan diseminasi fakta yang benar. Adi Marsiela mengungkapkan kesulitan dalam memastikan informasi hasil cek fakta dapat masuk dan diterima di kalangan masyarakat yang lebih personal seperti grup keluarga, di mana hoaks seringkali lebih mudah menyebar dan dipercayai (Wawancara Adi Marsiela, 5 Juni 2025). Lingkungan digital yang memungkinkan penyebaran instan menjadi rintangan besar bagi upaya verifikasi yang membutuhkan ketelitian.

Tantangan lain yang ditemui koalisi CekFakta.com dalam *live fact-checking* mengidentifikasi pola komunikasi politik dan retorika dari kandidat yang berdebat merupakan tantangan tersendiri. Beberapa kandidat cenderung banyak memunculkan *gimmick* atau opini yang disampaikan tanpa

menyertakan informasi krusial atau data yang dapat diverifikasi secara faktual. Hal ini menyulitkan tim *fact-checker* karena klaim-klaim tersebut bersifat subjektif atau terlalu abstrak untuk diukur kebenarannya. Kondisi ini disampaikan dalam wawancara dengan Ika Ningtyas yang menyoroti perlunya media untuk lebih kritis dan substantif agar tidak mengamplifikasi propaganda atau pesan-pesan yang *gimmick* (Wawancara Ika Ningtyas Unggraini, 3 Juni 2025), yang menunjukkan bahwa tidak semua klaim dalam debat dapat langsung diverifikasi secara faktual karena sifatnya bukan klaim faktual.

Meskipun mengadopsi model kolaboratif untuk mengoptimalkan sumber daya, upaya *fact-checking* yang intensif selama debat Pemilu tetap memerlukan sumber daya manusia, kapasitas, teknis, dan finansial yang besar. Verifikasi *real-time* dan produksi ratusan artikel dalam waktu singkat, seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 2, memerlukan dedikasi dan kapasitas yang tinggi dari jurnalis dan tim pendukung di berbagai media anggota. Hal ini juga disampaikan oleh Ika Ningtyas Unggraini, bahwa media yang tergabung dalam kolaborasi ini tidak semuanya memiliki *dedicated team* dan sumber daya yang memadai untuk melakukan *fact checking*, sehingga sebagian besar bergantung pada media besar yang punya tim sendiri seperti Tempo.co, Liputan6.com, dan Kompas.com atau Mafindo.

Di luar tantangan tersebut, ada juga peluang yang dilihat oleh koalisi CekFakta.com. Intensitas disinformasi selama Pemilu justru dapat meningkatkan kesadaran

masyarakat akan pentingnya informasi yang akurat dan peran *fact-checking*. Upaya CekFakta.com dapat menjadi katalisator bagi peningkatan literasi media di kalangan publik, mendorong mereka untuk lebih kritis terhadap informasi yang diterima (Wawancara Adi Marsiela, 3 Juni 2025).

Penelitian ini mengungkapkan bahwa CekFakta.com berhasil mengimplementasikan model *collaborative fact-checking* yang efektif dalam mengkurasi dan memeriksa fakta selama debat Pemilu 2024. Kapasitas mereka dalam merespons klaim yang beredar terlihat dari volume identifikasi klaim (200 klaim, Tabel 1) dan jumlah artikel pemeriksaan fakta yang dihasilkan (397 artikel, Tabel 2), menunjukkan skala operasional yang signifikan di bawah tekanan waktu. Sinergi antar media anggota, mulai dari identifikasi klaim, verifikasi, hingga penulisan, menjadi faktor kunci efisiensi dan jangkauan upaya mereka.

Perbedaan dalam struktur penulisan artikel antar media anggota (Tabel 5) dapat mengurangi keseragaman pesan, meskipun data faktualnya seragam (Wawancara Adi Marsiela, 3 Juni 2025). Prevalensi klaim "Salah" yang tinggi (154 artikel, Tabel 3) dalam debat Pemilu secara jelas menunjukkan bahwa disinformasi adalah tantangan utama yang dihadapi CekFakta.com. Ini sejalan dengan definisi disinformasi sebagai informasi palsu yang disebarkan dengan niat menipu (Shu et al., 2020), dan menggarisbawahi motivasi di balik penyebarannya (Wardle, 2019).

Kolaborasi CekFakta.com juga memiliki tantangan-tantangan yang signifikan. Salah satunya adalah kompleksitas klaim berbasis opini atau retorika yang sering kali disampaikan oleh kandidat. Klaim semacam ini sulit untuk diverifikasi karena tidak memiliki data konkret sebagai dasar. Hal ini sejalan dengan teori Wardle dan Derakhshan (2017), yang menekankan bahwa informasi yang bersifat ambigu atau tidak berbasis fakta sering kali lebih sulit ditangani dibandingkan dengan klaim yang memiliki data pendukung. Selain itu, tekanan dari pihak tertentu, termasuk kelompok pendukung kandidat, berpotensi memengaruhi independensi tim dalam memverifikasi klaim.

Praktik CekFakta.com merepresentasikan evolusi peran *fact-checking* di era digital. Mereka bertindak sebagai *gatekeepers* informasi yang aktif (Lim, 2018), tetapi dengan perspektif integratif yang melampaui peran tradisional media. Kolaborasi ini menunjukkan bagaimana media tetap memegang akurasi sebagai klaim substantif di tengah arus informasi yang deras (Lecheler & Kruikemeier, 2016; Nieminen & Rapeli, 2018). Lebih jauh, melalui verifikasi klaim kandidat politik selama debat, CekFakta.com secara efektif menjalankan fungsi *watchdog journalism* (Hamada & Abdel-Salam, 2024), yaitu mengawasi dan meminta akuntabilitas dari para aktor politik, yang sangat krusial dalam sebuah proses demokrasi.

Keberhasilan CekFakta.com dalam memproduksi volume besar artikel pemeriksaan fakta (397 artikel, Tabel 2) mendukung efektivitas

model *Collaborative Fact-Checking* sebagai praktik jurnalisme yang adaptif. CekFakta.com berfungsi sebagai sebuah kolaborasi antar organisasi media yang berupaya secara kolektif untuk memerangi disinformasi politik secara masif (Wardle & Derakhshan, 2017). Proses berbagi sumber daya dan data (seperti *spreadsheet* klaim) serta *review* silang meningkatkan efisiensi dan kapasitas dalam menghadapi skala disinformasi (Graves & Cherubini, 2016). Studi kasus lain seperti CrossCheck (CrossCheck: Our Collaborative Online Verification Newsroom, 2017), IFCN (International Fact-Checking Network, 2018), CoFacts (Cofacts, 2023), dan AFCA (Africa, 2023) menguatkan bahwa pendekatan kolaboratif adalah respons yang adaptif terhadap tantangan disinformasi global dan lokal.

Pendekatan neo-institusionalisme menawarkan pemahaman mendalam mengenai pola kolaborasi yang terjadi di CekFakta.com. Dalam kerangka ini, media-media yang tergabung dalam kolaborasi membentuk sebuah bidang interorganisasional yang diikat oleh norma, nilai, dan praktik profesional bersama. Meskipun secara formal merupakan entitas yang terpisah dan berkompetisi, dalam konteks pemeriksaan fakta mereka mengadopsi “kesepakatan transorganisasional mengenai proses dan konten berita” (Cook, 2005 dalam Strömbäck & Esser, 2014)

Dokumen panduan teknis yang disusun dan disepakati bersama menjadi bukti konkret adanya internalisasi norma dan praktik bersama di antara anggota

kolaborasi. Standar operasional dan etika jurnalistik yang seragam memastikan bahwa proses pemeriksaan fakta berjalan konsisten, terkoordinasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kolaborasi ini memperlihatkan bagaimana media, melalui institusionalisasi norma dan nilai bersama, dapat berperan sebagai institusi sosial yang menjaga integritas informasi publik selama momen-momen krusial seperti pemilu.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kolaborasi CekFakta.com telah membuktikan perannya sebagai inisiatif *collaborative fact-checking* dalam menjaga integritas informasi selama debat Pemilu 2024. Melalui mekanisme kerja bersama yang terstruktur, didukung oleh panduan teknis dan pembagian tugas yang jelas, kolaborasi ini berhasil memproduksi ratusan artikel pemeriksaan fakta yang dipublikasikan secara luas oleh berbagai media anggota (mengidentifikasi 200 klaim dan menghasilkan 397 artikel pemeriksaan fakta).

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan signifikan yang dihadapi, seperti kecepatan penyebaran disinformasi di media sosial serta perbedaan standar pelabelan dan struktur artikel antar media anggota. Selain itu, banyaknya klaim yang bersifat opini atau retorika menambah kompleksitas proses verifikasi. Oleh karena itu, meskipun kolaborasi ini telah memberikan kontribusi penting terhadap integritas informasi publik, diperlukan inovasi

dan adaptasi berkelanjutan agar pemeriksaan fakta tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika demokrasi digital yang semakin kompleks. Untuk memahami lebih dalam dampak *fact-checking* dalam konteks politik dan demokrasi, penelitian lebih lanjut diperlukan. Beberapa area yang dapat dieksplorasi termasuk analisis bagaimana *live fact-checking* mempengaruhi perilaku pemilih, efektivitas berbagai metode *fact-checking* dalam mengurangi penyebaran disinformasi, dan peran media sosial dalam mendistribusikan informasi yang telah diverifikasi.

Daftar Pustaka

- Africa, C. for. (2023, August 31). About AFCA. *African Fact Checking Alliance*. <https://factcheck.africa/about-afca-658670a36eb5>
- Bak-Coleman, J. B., Kennedy, I., Wack, M., Beers, A., Schafer, J. S., Spiro, E. S., Starbird, K., & West, J. D. (2022). Combining interventions to reduce the spread of viral misinformation. *Nature Human Behaviour*, 6(10), 1372–1380. <https://doi.org/10.1038/s41562-022-01388-6>
- Belinda, F., Somantri, G. R., Runturambi, A. J. S., & Puspitasari, M. (2024). Manipulation of information in the 2024 election in Indonesia: political dynamics in the post-truth era. *Migration Letters*, 21(3), 43-58. <https://doi.org/10.59670/ml.v21i3.6517>

- Bond, G. D., Holman, R. D., Eggert, J. L., Speller, L. F., Garcia, O. N., Mejia, S. C., McInnes, K. W., Cenicerros, E. C., & Rustige, R. (2017). 'Lyin' Ted', 'crooked hillary', and 'Deceptive Donald': Language of lies in the 2016 US presidential debates. *Applied Cognitive Psychology*, 31(6), 668–677.
<https://doi.org/10.1002/acp.3376>
- Bond, G. D., Speller, L. F., Cockrell, L. L., Webb, K. G., & Sievers, J. L. (2022). 'Sleepy Joe' and 'Donald, King of Whoppers': Reality monitoring and verbal deception in the 2020 U.S. presidential election debates. *Psychological Reports*, 126(6), 3090–3103.
<https://doi.org/10.1177/00332941221105212>
- Cofacts. (2023, February 6). Rights CoLab.
https://rightscolab.org/case_study/cofacts/
- CrossCheck: Our collaborative online verification newsroom. (2017, May 16). First Draft.
<https://firstdraftnews.org/about/crosscheck-newsroom/>
- Graves, L., & Amazeen, M. A. (2019). Fact-Checking as idea and practice in journalism. In *Oxford Research Encyclopedia of Communication*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228613.013.808>
- Graves, L., & Cherubini, F. (2016). The rise of fact-checking sites in Europe. *Reuters Institute for the Study of Journalism*.
<https://doi.org/10.60625/risj-tdn4-p140>
- Hamada, B. I., & Abdel-Salam, A.-S. G. (2024). Determinants of watchdog journalism: A global empirical approach. *International Communication Gazette*, 87(3), 191–216.
<https://doi.org/10.1177/17480485241288401>
- International Fact-Checking Network. (2018, November 13). Poynter.
<https://www.poynter.org/ifcn/>
- Jadwal Lengkap Pemilu 2024 dan Tahapannya. (2023, Oktober 19). CNN Indonesia. Retrieved Desember 7, 2024, from <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20231019101626-561-1013219/jadwal-lengkap-pemilu-2024-dan-tahapannya>
- Keller, F. B., Schoch, D., Stier, S., & Yang, J. (2019). Political astroturfing on twitter: How to coordinate a disinformation campaign. *Political Communication*, 37(2), 256–280.
<https://doi.org/10.1080/10584609.2019.1661888>
- Kruikemeier, S., & Lecheler, S. (2016). News consumer perceptions of new journalistic sourcing techniques. *Journalism Studies*, 19(5), 632–649.
<https://doi.org/10.1080/1461670x.2016.1192956>
- Lee, S., Xiong, A., Seo, H., & Lee, D. (2023). "Fact-checking" fact checkers: A data-driven approach. *Harvard Kennedy School Misinformation Review*.
<https://doi.org/10.37016/mr-2020-126>
- Lim, C. (2018). Checking how fact-checkers check. *Research & Politics*, 5(3).

- <https://doi.org/10.1177/2053168018786848>
- Nieminen, S., & Rapeli, L. (2018). Fighting Misperceptions and Doubting Journalists' objectivity: A review of fact-checking literature. *Political Studies Review*, 17(3), 296–309. <https://doi.org/10.1177/147892918786852>
- Rahmawan, D., Hartanto, R., & Garnesia, I. (2022). Multi case analysis on the development of fact-checking organizations in Indonesia. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 10(1), 14. <https://doi.org/10.24198/jkk.v10i1.38752>
- Shu, K., Wang, S., Lee, D., & Liu, H. (2020). Mining disinformation and fake news: Concepts, methods, and recent advancements. In *Lecture Notes in Social Networks* (pp. 1–19). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-42699-6_1
- Singer, J. B. (2023). Closing the barn door? Fact-Checkers as retroactive gatekeepers of the COVID-19 “infodemic.” *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 100(2), 332–353. <https://doi.org/10.1177/10776990231168599>
- Tapsell, R. (2018, January 11). *Disinformation and democracy in Indonesia*. New Mandala. <https://www.newmandala.org/disinformation-democracy-indonesia/>
- Wardle, C. (2019). *Understanding Information Disorder*. First Draft. https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2019/10/Information_Disorder_Digital_AW.pdf
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017, September 27). *INFORMATION DISORDER: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making Information...* Council of Europe. https://www.researchgate.net/publication/339031969_INFORMATION_DISORDER_Toward_an_interdisciplinary_framework_for_research_and_policy_making_Information_Disorder_Toward_an_interdisciplinary_framework_for_research_and_policy_making
- Wintersieck, A. L. (2017). Debating the truth. *American Politics Research*, 45(2), 304–331. <https://doi.org/10.1177/1532673x16686555>